

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini penulis akan menyajikan pembahasan mendalam mengenai tinjauan pustaka yang menjadi dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran penelitian ini. Tinjauan pustaka tersebut berfungsi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian, serta untuk mengidentifikasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan argumen dan analisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini diharapkan dapat memperkuat landasan teori yang digunakan serta memberikan kontribusi dalam merumuskan hipotesis dan tujuan penelitian yang lebih terarah dan terukur.

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.1.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator komposit yang dirancang untuk mengukur pencapaian kualitas hidup manusia secara menyeluruh dalam suatu wilayah, tidak hanya berdasar pada aspek ekonomi seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) semata. IPM mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia melalui komponen kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), komponen pendidikan (akses dan kualitas pendidikan), serta kompoonen standar hidup layak (kemampuan memperoleh pendapatan dan akses kebutuhan dasar). Dalam konteks metodologi pengukuran, indikator kesehatan diwakili oleh angka harapan hidup saat lahir, indikator pendidikan meliputi rata-

rata lama sekolah dan angka melek huruf, sedangkan indikator standar hidup diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita (GNI per kapita) atau indikator moneter lain yang relevan.

Sifat dari IPM adalah multidimensi dan kompleks, karena memadukan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sekaligus, didasarkan pada teori pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Amartya Sen dan kemudian diimplementasikan oleh Mahbub ul Haq melalui konsep *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, peningkatan nilai IPM suatu daerah menuntut intervensi yang terintegrasi misalnya, meningkatkan layanan kesehatan, memperluas akses pendidikan berkualitas, dan menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan pendapatan layak bagi penduduk. Dengan demikian, IPM bersifat juga normatif yakni sebagai standar aspiratif pembangunan manusia. Secara keseluruhan, IPM dapat diartikan sebagai ukuran untuk menilai kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah, yang memperhitungkan aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM memfasilitasi perbandingan antar wilayah dan periode waktu serta mendasari pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kualitas hidup (Pahlawan et al., 2023)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi atau komponen utama yang mencerminkan aspek fundamental pembangunan manusia.

a. Dimensi Kesehatan (*Longevity and Health*)

Menggambarkan kemampuan masyarakat untuk hidup panjang dan sehat. Indikator utama dari dimensi ini adalah angka harapan hidup saat lahir, yang

menunjukkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang berdasarkan kondisi kesehatan dan kualitas layanan medis di wilayah tersebut. Semakin tinggi angka harapan hidup, maka semakin baik pula derajat kesehatan masyarakat dan efektivitas kebijakan publik di bidang kesehatan, seperti akses terhadap fasilitas medis, gizi yang memadai, dan lingkungan yang bersih.

b. Dimensi Pendidikan (*Knowledge and Education*)

Diukur melalui dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah mencerminkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan harapan lama sekolah menunjukkan jumlah tahun pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak pada usia sekolah. Kedua indikator ini mencerminkan kemampuan sistem pendidikan suatu negara dalam memberikan akses dan kesempatan belajar yang setara bagi masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan kualitas hidup mereka.

c. Dimensi Standar Hidup Layak (*Decent Standard of Living*)

Berfokus pada aspek ekonomi dan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Komponen utama dimensi ini adalah Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita yang disesuaikan dengan *Purchasing Power Parity (PPP)* agar dapat mencerminkan daya beli riil masyarakat. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana individu memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk mengakses kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin besar pula kemampuan masyarakat

untuk hidup layak dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Ketiga dimensi ini kemudian digabungkan secara geometrik untuk menghasilkan nilai IPM yang komprehensif, yang tidak hanya mengukur kemajuan ekonomi, tetapi juga menggambarkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.

Formulasi bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan diperoleh dari rata-rata tiga komponen utama yang mencerminkan kualitas hidup manusia. Indeks kesehatan diukur berdasarkan harapan hidup saat lahir yang menunjukkan tingkat kesejahteraan dan layanan kesehatan masyarakat. Indeks pendidikan mencakup rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang menggambarkan akses dan kualitas pendidikan. Sementara itu, indeks pendapatan dihitung dari pendapatan nasional bruto per kapita yang mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga indeks ini digabungkan secara seimbang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berakar dari sejumlah teori pembangunan ekonomi dan sosial yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Teori-teori ini menjadi dasar konseptual bagi penyusunan indikator IPM yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1990. Beberapa teori utama yang melandasi IPM antara lain:

a. *Economic Growth Theory & Human Development Theory*

Teori pertumbuhan ekonomi (*Solow Growth Theory* dan *Endogenous Growth Theory*) menyatakan bahwa peningkatan output nasional mencerminkan

kemampuan perekonomian dalam menciptakan nilai tambah dan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan meningkatkan kapasitas fiskal negara dan pendapatan masyarakat, sehingga memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Selanjutnya, *Human Development Theory* (UNDP) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai pembangunan manusia, bukan tujuan akhir. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan IPM melalui perbaikan dimensi kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

b. *Institutional Theory & Good Governance Theory*

Institutional Theory menekankan bahwa kualitas institusi menentukan efektivitas kebijakan publik dan kinerja pembangunan. Korupsi yang rendah mencerminkan institusi yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga anggaran publik dapat dialokasikan secara efisien dan tepat sasaran. Selanjutnya, *Good Governance Theory* menyatakan bahwa pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi mampu meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, semakin baik tingkat *control of corruption*, semakin besar peluang peningkatan IPM.

c. *Keynesian Theory & Public Expenditure Theory*

Teori Keynesian menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting untuk mendorong aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui belanja publik di sektor sosial. *Public Expenditure Theory* menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan

manusia. Alokasi anggaran yang memadai dan efektif pada sektor-sektor tersebut secara langsung meningkatkan dimensi IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan yang tercermin dari naiknya pendapatan perkapita riil. Faktor-faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi investasi, kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, stabilitas kebijakan, dan keterbukaan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena peningkatan pendapatan nasional memungkinkan perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Asmara et al., 2024). Namun, efek positif ini tidak bersifat otomatis, sebab pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM sangat tergantung pada keberlanjutan dan pemerataan hasil pembangunan (Saputra, 2024).

$$\text{Growth Rate} = \frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}} \times 100\%$$

Rumus pertumbuhan ekonomi tersebut menghitung perubahan nilai GDP dari tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam bentuk persentase. Selisih antara GDP tahun berjalan (GDP_t) dan GDP tahun sebelumnya (GDP_{t-1}) menunjukkan peningkatan atau penurunan output nasional. Nilai tersebut kemudian dibagi dengan GDP tahun sebelumnya untuk mengetahui proporsi perubahan yang terjadi, lalu dikalikan 100 persen agar hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase.

Dengan demikian, rumus ini memberikan gambaran seberapa cepat atau lambat perekonomian berkembang dalam suatu periode waktu.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berperan sebagai fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations*, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi.

a. Teori Pertumbuhan Neoklasik (Model Solow)

Teori pertumbuhan neoklasik Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Meskipun tenaga kerja awalnya dipandang homogen, kualitas sumber daya manusia terbukti memengaruhi produktivitas faktor produksi. Tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik mampu mengoptimalkan penggunaan modal dan teknologi, sehingga meningkatkan output per pekerja dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer dan Lucas menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari faktor internal, terutama akumulasi modal manusia dan pengetahuan. Sumber daya manusia yang terdidik dan terampil memiliki peran penting dalam menciptakan inovasi serta

mengembangkan teknologi. Inovasi dan kemajuan teknologi tersebut meningkatkan efisiensi produksi dan menjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

c. Teori modal manusia (*Human Capital Theory*)

Teori modal manusia yang dikemukakan oleh Schultz dan Becker menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui tingkat pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Investasi pada manusia meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu menghasilkan output yang lebih tinggi. Peningkatan produktivitas tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, karena tenaga kerja yang berkualitas mampu bekerja lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan ekonomi.

2.1.3 *Foreign direct investment*

2.1.3.1 *Pengertian Foreign direct investment*

Foreign Direct Investment atau Penanaman Modal Asing Langsung merupakan bentuk investasi lintas negara di mana individu atau perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya pada perusahaan di negara lain dengan tujuan memperoleh kendali manajerial jangka panjang dan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan perusahaan. Selain itu, (UNCTAD, 2024) menegaskan bahwa FDI mencerminkan hubungan jangka panjang yang menunjukkan adanya kontrol atau pengaruh signifikan oleh investor asing terhadap perusahaan di negara penerima, sehingga hubungan tersebut tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mencakup

transfer teknologi, manajemen, dan keterampilan. Bentuk FDI dapat berupa pendirian perusahaan baru (*greenfield investment*), akuisisi, atau perluasan cabang perusahaan yang sudah ada. Selain memberikan tambahan modal, FDI juga berperan dalam transfer teknologi, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan akses pasar internasional, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi negara penerima serta menjadikan kesejahteraan masyarakat meningkat (Yang, 2024)

Menurut David K Eiteman motif yang mendasari penanaman modal asing ada tiga yaitu:

- a. Motif strategis (mencari pasar, mencari bahan baku, mencari efisiensi produktif, mencari pengetahuan, mencari keamanan politik)
- b. Motif perilaku (merupakan suatu rangsangan lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok)
- c. Motif ekonomi merupakan motif mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.

Adapun teori yang melandasi *Foreign direct investment* adalah:

- a. Teori *Spillover Effect*

Teori *spillover effect* menjelaskan bahwa masuknya FDI menghasilkan penyebaran teknologi, inovasi, dan pengetahuan manajerial dari perusahaan multinasional kepada tenaga kerja lokal. Transfer kemampuan ini terjadi melalui pelatihan, proses produksi bersama, perekrutan pekerja lokal, dan interaksi

industri. Peningkatan keterampilan ini memperkuat kualitas sumber daya manusia dan berkontribusi pada dimensi pendidikan dalam IPM. Selain itu, teknologi yang lebih efisien meningkatkan produktivitas dan upah, yang pada akhirnya memperbaiki standar hidup masyarakat sebagai bagian dari indikator IPM.

b. *Human Capital Enhancement Theory*

Menurut teori ini, FDI berperan sebagai agen peningkatan *human capital* melalui investasi dalam pelatihan tenaga kerja, transfer keterampilan teknis, dan penguatan kompetensi profesional. Perusahaan asing umumnya menerapkan standar operasional yang tinggi, sehingga menuntut kualitas keterampilan pekerja yang lebih baik. Kondisi tersebut mendorong peningkatan kompetensi pendidikan dan kapasitas produktif masyarakat. Kenaikan kualitas *human capital* secara langsung meningkatkan dua dimensi IPM, yaitu pendidikan dan pendapatan.

2.1.3.2 Manfaat *Foreign direct investment*

Foreign Direct Investment (FDI) memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang. FDI tidak hanya menyediakan tambahan modal asing, tetapi juga berfungsi sebagai sarana transfer teknologi dan pengetahuan manajerial dari perusahaan multinasional kepada perusahaan domestik. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi, daya saing industri, serta produktivitas tenaga kerja. Selain itu, FDI juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan kapasitas infrastruktur ekonomi (Rahman & Lin, 2020). FDI sering dianggap sebagai katalis pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mempercepat integrasi ekonomi global dan memperkuat struktur industri domestik

(Khan, 2021). Namun, manfaat FDI akan lebih optimal apabila negara penerima memiliki lingkungan investasi yang stabil, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kebijakan ekonomi yang mendukung investasi berkelanjutan (Trinh, 2025). Dengan demikian, FDI bukan sekadar aliran modal, tetapi instrumen pembangunan yang dapat mempercepat kemajuan sosial-ekonomi melalui inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Dilihat dari sudut pandang ini, terlihat bahwa kehadiran investor asing cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Berbagai manfaat tersebut kemudian dirangkum (Budi, 2008) mengemukakan bahwa ada tujuh keuntungan yang bisa didapatkan saat melakukan investasi khususnya investasi asing, yaitu:

- 1) Menciptakan lapangan kerja bagi penduduk negara tuan rumah. Dengan terciptanya lapangan kerja, maka penduduk negara tuan rumah dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidupnya.
- 2) Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah. Dengan adanya kesempatan dalam penanaman modal di perusahaan-perusahaan maka pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut juga dapat menjadi asset masyarakat untuk menghasilkan pendapatan.
- 3) Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah. Adanya investasi yang masuk, maka dana yang dapat digunakan untuk produksi akan meningkat dan kemudian akan disertai meningkatnya produksi. Dengan demikian, kegiatan ekspor akan semakin meningkat.

- 4) Menghasilkan pengalihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain.
- 5) Memperluas potensi keswasembadaaan negara tuan rumah. Potensi tersebut dapat diguakan dengan cara memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor.
- 6) Menghasilkan pendapatan pajak tambahan. Ada aliran dana masuk ke dalam negeri, maka aka nada pula pendapatan oajak yang diterima oleh pemerintah. Pendapatan pajak tersebut dapat dipergunakan demi kepentingan pembangunan dan perekonomian negara tuan rumah.
- 7) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan lebih maksimal.

2.1.4 *Control of corruption*

2.1.4.1 Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan fenomena sosial dan politik yang telah ada sejak peradaban kuno, mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan konsekuensi dari sistem kekuasaan yang tidak transparan. Seiring perkembangan negara modern, korupsi semakin terlembaga melalui praktik patronase politik, ketidakstabilan kelembagaan, dan lemahnya mekanisme pengawasan.

Negara yang membangun sistem pemerintahan dengan mekanisme kontrol dan transparansi sejak awal cenderung memiliki tingkat korupsi lebih rendah dibandingkan negara yang tumbuh dari sistem kekuasaan otoriter atau sentralistik

(Treisman, 2000). Dalam hal ini, korupsi menjadi bagian dari adaptasi sosial-ekonomi terhadap lemahnya institusi hukum dan politik. Secara konseptual, korupsi diartikan sebagai *abuse of entrusted power for private gain*, yakni penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dipercayakan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan publik (Heywood, 2016). Definisi ini menegaskan adanya relasi antara kekuasaan, kepercayaan, dan penyalahgunaan dalam konteks publik. Secara historis, korupsi telah berevolusi dari praktik individu menjadi fenomena sistemik yang memerlukan pendekatan multidisipliner untuk penanggulangannya.

2.1.4.2 Teori Korupsi

a) Teori Means – Ends Scheme Robert

Teori ini dikemukakan oleh Robert Merton yang menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma.

b) Teori Solidaritas Sosial

Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya.

c) Teori Vroom

Teori ini menyatakan bahwa korupsi merupakan nilai negatif dari harapan seseorang untuk mencapai sesuatu. Teori ini memandang bahwa motivasi seseorang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh harapan dan nilai yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang.

2.1.4.3 *Control of corruption*

Control of corruption atau kendali korupsi adalah indikator yang mengukur sejauh mana kekuasaan publik dijalankan untuk kepentingan pribadi, termasuk baik dalam bentuk korupsi kecil (seperti suap dalam pelayanan publik) maupun korupsi besar (seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi negara). Indikator ini juga mencakup sejauh mana negara berhasil menegakkan hukum terhadap praktik korupsi serta kemampuan lembaga-lembaga pemerintah dalam mencegah penyimpangan administrasi dan keuangan publik.

Tata kelola terdiri dari tradisi dan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menjalankan otoritas di suatu negara. Peringkat persentil menunjukkan peringkat negara di antara semua negara yang tercakup dalam indikator agregat, dengan 0 sesuai dengan peringkat terendah, dan 100 untuk peringkat tertinggi.

Menurut *World Bank* dalam kerangka *Worldwide Governance Indicators (WGI)*, *Control of Corruption (percentile rank)* merupakan indikator yang mengukur sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk praktik korupsi kecil (*petty corruption*) maupun korupsi besar (*grand corruption*), serta sejauh mana negara mampu mengendalikan praktik tersebut. Dalam bentuk *percentile rank*, nilai indikator ini dinyatakan pada skala 0 sampai 100 yang menunjukkan posisi relatif suatu negara dibandingkan negara lain di dunia. Semakin tinggi nilai *percentile rank* (mendekati 100), semakin baik kemampuan negara tersebut dalam mengendalikan korupsi dan sebaliknya, nilai yang rendah (mendekati 0) mencerminkan lemahnya pengendalian korupsi. Penilaian ini disusun berdasarkan berbagai sumber data, seperti survei persepsi

pelaku usaha, rumah tangga, dan penilaian para ahli, sehingga menggambarkan persepsi global terhadap kualitas tata kelola dan integritas institusi publik suatu negara.

2.1.5 Pengeluaran Pemerintah

2.1.5.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Belanja pemerintah mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh lembaga negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik yang bersifat operasional maupun jangka panjang. Belanja pemerintah dapat dikategorikan ke dalam dua jenis pokok yaitu, belanja konsumsi (*current expenditure*) dan belanja modal (*capital expenditure*). Belanja konsumsi meliputi pembayaran gaji pegawai, operasional publik, subsidi, dan biaya rutin lainnya, sedangkan belanja modal ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, dan investasi produktif yang memperkuat kapasitas ekonomi (Schick, dalam *A Contemporary Approach to Public Expenditure Management*). Namun, efektivitas belanja pemerintah tidak semata bergantung pada besarannya, melainkan juga pada efisiensi, alokasi, dan manajemen pengeluaran publik (*public expenditure management*). Praktik pengelolaan yang baik harus menjamin disiplin anggaran, efisiensi operasional, dan evaluasi hasil program (Thomas, dalam kajian *Public Expenditure Management*). Dalam konteks alokasi, pergeseran dari komponen belanja non-produktif ke belanja produktif diyakini dapat memperbesar dampak ekonomi sekaligus memperbaiki pemerataan.

Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui sektor kesehatan dan pendidikan yang merupakan

pilar utama pembangunan manusia. Secara ilmiah, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berfungsi meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, menurunkan angka kematian, serta memperpanjang harapan hidup masyarakat komponen penting dalam dimensi kesehatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara itu, pengeluaran pada sektor pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses, peningkatan mutu pendidikan, serta peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Secara umum, jenis-jenis belanja pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasional (Belanja Rutin / *Current Expenditure*)

Jenis belanja ini digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari atau operasional pemerintahan. Belanja operasional bersifat tidak menghasilkan aset baru, tetapi penting untuk menjaga keberlangsungan layanan publik dan administrasi negara. Contohnya, gaji dan tunjangan pegawai negeri, biaya kepentingan kantor, dan subsidi barang dan jasa.

2. Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Belanja ini digunakan untuk pembangunan dan pembelian aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang bagi negara. Jenis belanja ini dianggap produktif karena dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pelayanan publik. Contohnya, pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah), Renovasi dan pemeliharaan aset publik.

3. Belanja Transfer / Hibah (*Transfer Expenditure*)

Merupakan pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada pihak lain tanpa imbalan langsung, baik kepada pemerintah daerah, lembaga, maupun masyarakat. Tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Contohnya, beasiswa pendidikan, dana desa dan dana bagi hasil ke pemerintah daerah.

Berikut penjelasan dan beberapa teori utama yang menjelaskan pengeluaran pemerintah:

1. *Human Capital Accumulation Model* – Robert E. Lucas

Lucas (1988) menekankan bahwa akumulasi modal manusia merupakan kunci peningkatan kualitas tenaga kerja. Dalam kerangka ini, pengeluaran pemerintah pada pendidikan dan pelatihan mempercepat proses peningkatan keterampilan dan pengetahuan individu. Semakin besar pengeluaran pemerintah pada sektor pengembangan manusia, semakin tinggi kualitas SDM yang dihasilkan, sehingga berdampak positif terhadap pembangunan manusia.

2. *Public Expenditure Theory on Social Services* – Richard A. Musgrave

Pengeluaran pemerintah memiliki peran aktif dalam menstabilkan perekonomian. Dalam kondisi resesi, pemerintah harus meningkatkan pengeluaran untuk mendorong permintaan agregat (*aggregate demand*). Teori ini menekankan bahwa belanja publik merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

3. Teori Wagner (*Wagner's Law of Increasing State Activity*)

Dikemukakan oleh Adolph Wagner, teori ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan

modernisasi. Ketika pendapatan nasional naik, masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih baik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Akibatnya, pengeluaran pemerintah tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDB.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu di bawah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil studi sebelumnya yang relevan dengan variabel penelitian ini

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Analisis Pengaruh Pdb Perkapita, Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran Terhadap Ipm di Negara-Negara Asean Tahun 2009-2018 Penulis: (Dewa et al., 2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • PDB Perkapita • Pengangguran 	Menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.	<i>Diponegoro Journal of Economics</i> , Volume 10, Nomor 3 (2021)
2	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Penulis: (Hesty & Ichan, 2023) Hesty dan Ichan (2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah • Pertumbuhan Ekonomi • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi Fiskal 	Menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh.	Jurnal <i>Ekonomi Regional Unimal</i> , Vol. 6 No. 2 (2023)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Dampak Kemiskinan, PDRB, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sebuah Studi Empiris di Provinsi Riau Tahun 2018-2023 Penulis: (Wijayanti & Raihansyah, 2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan • PDRB • Pengangguran 	Menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah meningkatkan dan berpengaruh terhadap IPM.	p-ISSN: 1411-4054/e-ISSN: 2579-3217
4	Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika Penulis: (Abu bakar, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran Pemerintah • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi Rumah Tangga 	Menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM.	Junal Kritis Volume 4 Nomor 2 Edisi Oktober 2020 Issn 2579-785
5	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Pengeluaran Pemerintah • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kemiskinan 	Menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi secara bersama sama berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Utara.	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Studi Pada 8 Kabupaten di Sulawesi Utara) Penulis : (Angela Nirmala Maria Lumi ¹ , Paulus Kindangen ² , 2022)				
6	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi, Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2012-2022 (Studi Kasus Provinsi Sumatera Selatan) Penulis: (Fathu et al., 2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendidikan Kemiskinan 	Menunjukkan bahwa berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Masalah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 3 (2024)
7	Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Penganggura, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam Penulis : (Jathu, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan • Pengangguran 	Menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan.	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2 (2020)
8	Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ipm	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan 	Menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh	<i>Journal Of Economics</i> E-ISSN : 2798-5008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten Tulungagung Penulis : (Diella, 2022)			negatif dan signifikan terhadap IPM.	
9	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Ipm Di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2018 Penulis : (Zaidatul, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan • Belanja Modal 	Menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<i>dynamic: Directory Journal of Economic Volume 2 Nomer 4</i>
10	Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing, Pendapatan Asli Daerah Dan Ketimpangan Pendapata Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Mimika Penulis : (Prastya et al., 2025)	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Modal Asing • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli daerah • Ketimpangan pendapatan 	Menunjukkan bahwa penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap IPM.	<i>borjuis: journal of economy</i>
11	Pengaruh Upah Minimum Provinsi (Ump), Penanaman Modal Asing (Pma), dan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Modal Asing • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Upah Minimum Provinsi • PDRB 	Menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM	Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Volume 7, Nomor 1 (2024)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Studi Kasus 11 Provinsi Ipm <i>Lower medium</i>) Penulis : (Fanny, 2024)				
12	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penulis : (Gama & Fathurrahman, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Modal Asing • Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan dan Pendidikan • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Modal Dalam Negeri 	Menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pendidikan dan Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.	<i>Journal of Economics Research and Social Sciences</i>
13	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Negara Apec Penulis : (Dita, 2020)	Variabel X : <ul style="list-style-type: none"> • Korupsi • Pertumbuhan ekonomi • Pengeluaran Pemerintah • IPM 	Variabel X : <ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan 	Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, sedangkan pengeluaran sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.	Diponegoro <i>Journal of Economics</i> , Vol. 9 No. 3 (2020)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Pengaruh Korupsi Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia : Pendekatan Regresi Panel Terhadap Negara Anggota Kerja Sama Islam (OKI) Penulis : (Fitriani, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Korupsi • Pengeluaran Pemerintah • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Penanaman Modal Dalam Negeri • Angkatan Kerja 	Menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di negara OKI.	<i>Dspace UII (Institutional Repository UII)</i>
15	<i>Corruption, Government Effectiveness and Human Development in Sub-Saharan Africa</i> Penulis : (Akinbode & Alawode, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Korupsi • IPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pemerintahan 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	<i>Journal for the Advancement of Developing Economies</i>

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian (Sugiyono, 2013).

Teori Pembangunan Manusia (*Human Development Theory* - Amartya Sen) menekankan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi pada perluasan *capabilities* manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh empat variabel terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 5 negara berkembang di

Asia. Berikut hubungan antara masing-masing variabel dengan Indeks Pembangunan Manusia.

2.2.1 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia

Teori pertumbuhan neoklasik Solow menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi, di mana kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, output per pekerja, dan laju pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian (Fathu et al., 2024) Laju Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena peningkatan aktivitas ekonomi mampu mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah, membuka lapangan pekerjaan, serta memperbaiki pendapatan masyarakat.

Laju pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena peningkatan aktivitas ekonomi mencerminkan bertambahnya kapasitas pendapatan masyarakat dan kemampuan fiskal pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi memungkinkan peningkatan alokasi anggaran bagi sektor pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta perbaikan daya beli masyarakat, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan standar hidup sebagai komponen utama IPM. Sebaliknya, kualitas pembangunan manusia yang lebih baik tercermin dari tingkat pendidikan dan

kesehatan yang lebih tinggi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja, memperkuat daya saing ekonomi, serta mendukung keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

2.2.2 Hubungan *Foreign direct investment* dengan Indeks Pembangunan Manusia

Teori *spillover effect* menyimpulkan bahwa masuknya FDI mendorong transfer teknologi, keterampilan, dan pengetahuan manajerial kepada tenaga kerja lokal, yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan pendapatan, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan IPM, khususnya pada dimensi pendidikan dan standar hidup. Dalam penelitian oleh (Gama & Fathurrahman, 2017) *Foreign direct investment* berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, hal ini terjadi karena masuknya investasi asing mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perluasan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk memperoleh keterampilan dan teknologi yang lebih maju.

Foreign Direct Investment (FDI) memiliki hubungan yang erat dan cenderung positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena aliran modal asing tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran perusahaan multinasional membawa transfer teknologi, pengetahuan manajerial, serta praktik produksi yang lebih efisien melalui pelatihan dan

interaksi kerja dengan tenaga kerja lokal. Proses ini meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan standar hidup masyarakat sebagai komponen utama pembentuk IPM.

2.2.3 Hubungan *Control of corruption* dengan Indeks Pembangunan

Manusia

Dalam perspektif teori *principal-agent*, korupsi terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan informasi dan lemahnya sistem pengawasan antara pihak yang memberikan mandat (*principal*) dan pihak yang menjalankan kebijakan (*agent*). Kondisi ini membuka peluang bagi agen untuk bertindak oportunistik dengan memanfaatkan sumber daya publik secara tidak semestinya. Lemahnya pengendalian korupsi menyebabkan alokasi anggaran, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, menjadi tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani, 2019) menemukan bahwa variabel korupsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian korupsi di suatu negara *Control of Corruption* semakin tinggi pula kualitas pembangunan manusia yang dicapai.

Control of corruption memiliki hubungan yang positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena rendahnya tingkat korupsi mencerminkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Pengendalian korupsi yang baik memastikan bahwa anggaran publik dan sumber daya negara dialokasikan secara efisien dan tepat sasaran, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial yang merupakan komponen utama

pembentuk IPM. Secara keseluruhan, perbaikan *control of corruption* berperan penting dalam menciptakan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan merata.

2.2.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Indeks Pembangunan

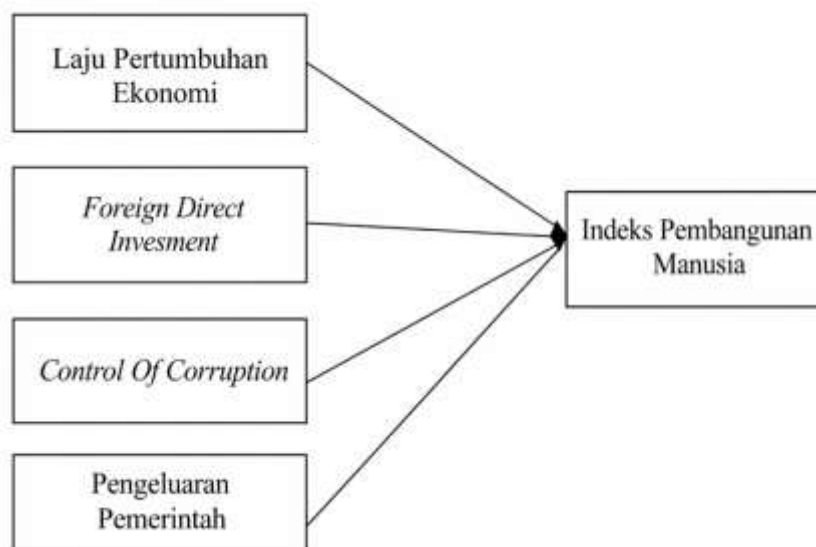
Manusia

Teori Pengeluaran Publik Musgrave menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah pada layanan sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan, merupakan instrumen utama dalam fungsi alokasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia. Sesuai dengan penelitian (Angela Nirmala Maria Lumil, Paulus Kindangen², 2022) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran pemerintah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah, akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan indikator-indikator IPM, seperti harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.

Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena belanja publik yang dialokasikan secara efektif pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial meningkatkan kualitas sumber daya manusia, akses terhadap layanan dasar, serta standar hidup

masyarakat, yang secara langsung mendorong peningkatan capaian pembangunan manusia.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan di atas, terdapat beberapa faktor yang diduga berpengaruh Indeks Pembangunan Manusia Yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, *Foreign Direct Investment*, *Control of Corruption* dan Pengeluaran Pemerintah. Setelah data diperoleh, maka akan dilakukan pengujian. Hasil dari pengujian akan dianalisa dan dibahas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan dan menarik kesimpulan. Adapun kerangka berpikir penelitian dengan judul “Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, *Foreign direct invesment*, *Control of Corruption*, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus 5 Negara Asia Tenggara Pada Tahun 2010-2023” adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

2.3 Hipotesis

Penelitian ini didasari oleh hipotesis asosiatif yang menunjukkan bahwa ada hubungan atau asosiasi antara variabel-variabel tersebut sebagai berikut:

- a. Diduga secara parsial Laju Pertumbuhan Ekonomi, *Foreign Direct Invesmet*, *Control Of Corruption*, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 5 negara Asia Tenggara tahun 2010-2023;
- b. Diduga secara bersama Laju Pertumbuhan Ekonomi, *Foreign direct invesment*, *Control Of Corruption*, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 5 negara di Asia Tenggara tahun 2010-2023.